

BAB I

Menyoal Moralitas Bangsa

Buta Aksara Moral

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa bangsa ini telah terjangkit penyakit buta aksara moral (*moral illiteracy*). Elemen bangsa ini seakan tidak mampu lagi membedakan antara benar-salah dan baik-buruk. Ungkapan tersebut terasa relevan untuk melukiskan kasus korupsi yang terus terjadi di negeri tercinta ini. Padahal, pemerintah telah membentuk begitu banyak lembaga *ad hoc* yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Salah satu lembaga anti rasuah yang kini menjadi harapan masyarakat adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Peningkatan jumlah kasus korupsi di antaranya dapat dibaca melalui pengumuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa selama kurun 2004-2012 ada 173 dari 524 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antara kepala daerah itu telah dinyatakan bersalah dan dimasukkan penjara. Kasus lain yang menyita begitu banyak perhatian publik adalah suap impor daging sapi, Hambalang, Simulator SIM, Bank Century, dan

cek perjalanan yang menyertai pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom.

Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita telah mengalami buta aksara moral secara berjamaah. Koruptor di negeri ini dengan penuh percaya diri terus melakukan kaderisasi. Mereka melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan jika latar belakang sosial koruptor kini pun sangat beragam; pengusaha, politisi, birokrat, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan elit agama. Pelaku korupsi juga merambah kelompok akademisi.

Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh KPK beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Seperti diketahui, Rudi adalah guru besar dan akademisi ternama ITB. Bahkan, Rudi sempat dinobatkan menjadi dosen teladan. Jika yang dipersangkakan KPK terbukti, itu berarti akan menambah daftar kaum intelektual yang tersandung kasus korupsi.

Umumnya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dilakukan dengan cara suap-menyuap, *mark up* dan *mark down* anggaran, serta penyalahgunaan jabatan. Ironinya, praktik korupsi di instansi pemerintahan pun dianggap sebagai fenomena yang biasa dengan dalih sudah sesuai "prosedur". Pola pikir ini jamak terjadi di lembaga-lembaga publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Yang lebih menyedihkan, sistem sosial budaya di masyarakat pun menunjukkan sikap yang permisif dengan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Karena itulah, Mochtar Lubis dalam kata pengantar untuk buku *Bunga Rampai Korupsi* (1988) mengingatkan bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak budaya. Korupsi dikatakan telah bermetamorfosis dalam banyak wajah (*multifaces*).

Ekspresi korupsi dapat berbentuk tindakan menerima uang sogokan, uang kopi, uang lelah, uang rokok, salam tempel, uang semir, dan uang pelancar atau pelumas. Bahkan untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, menantu, kerabat, dan teman dekatnya. Budaya sogok atau suap merupakan salah satu ekspresi korupsi yang paling mudah dijumpai di masyarakat.

Budaya itu tumbuh subur karena masyarakat menyikapi suap-menyuap dengan cara yang berbeda. Sebagian menyatakan bahwa

dalam kasus suap-menyuap tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji resmi. Pihak penyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan. Sepintas jalan pikiran tersebut benar.

Tetapi jika durenungkan, maka dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem. Budaya suap pada saatnya dapat merusak sistem sehingga tidak berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya hanya orang "beruang" yang dapat menikmati pelayanan. Sistem pelayanan pun akhirnya dibangun dengan logika *the rule of the rich*, yakni untuk melayani orang-orang kaya.

Di antara faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program pemberantasan korupsi adalah karena gerakan antikorupsi dinilai belum memiliki konsep yang jelas. Pemberantasan korupsi juga mengalami kevakuman ideologi sehingga belum menjadi gerakan bagi seluruh komponen. Yang dimaksud ideologi dalam kaitan ini adalah seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan.

Indikatornya, banyak orang yang berteriak-teriak anti korupsi saat masih berada di luar kekuasaan. Tetapi tatkala kekuasaan berada di genggaman, mereka pun tidak tahan godaan sehingga larut dalam budaya korupsi. Budaya korupsi dengan berbagai ekspresinya kini tidak hanya urusan kaum elit. Masyarakat lapisan bawah pun mengenal berbagai budaya korupsi. Akibatnya, praktik korupsi tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Ironinya, budaya korupsi terjadi dalam urusan yang berkaitan dengan kelahiran hingga kematian.

Itu dapat diamati dalam kegiatan yang melibatkan warga dan pejabat publik saat mengurus akta kelahiran. Begitu juga saat warga mengurus pemakaman anggota keluarganya, hampir semua aktivitas ini dijalani warga dengan cara yang dapat dikategorikan suap. Persoalannya, mengapa masyarakat begitu mudah terpengaruh budaya suap?

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan merujuk hasil survei Universitas Paramadina Jakarta dan Lembaga Pride Indonesia (2010). Hasil survei itu menyatakan bahwa tipologi masyarakat kita termasuk yang paling mudah disuap. Survei itu dilakukan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan mengapa praktik *money politics* dalam

pemilihan kepala daerah (pilkada) sulit diberantas.

Karakter mudah disuap itulah yang menjadikan budaya korupsi dengan segala ekspresinya sulit diberantas. Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bangsa ini mengalami gejala *moral illiteracy* akut. Bahkan lebih ekstrem, Profesor Taufiq Abdullah menyatakan bahwa bangsa ini telah mengalami *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan) yang melibatkan rakyat jelata hingga elit.

Meski korupsi telah merajalela tetapi karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya, maka usaha untuk memberantasnya harus tetap digelorakan. Itu berarti pejuang antikorupsi tidak boleh bersikap fatalis, dengan menyatakan bahwa karena korupsi sudah begitu akut maka usaha memberantasnya akan sia-sia.

Agar budaya korupsi dapat diberantas, pejuang antikorupsi harus konsisten menjadikan korupsi dengan segala ekspresinya sebagai musuh bersama (*common enemy*). Inilah spirit ideologis yang harus terus disemai dalam hati satubari. Komitmen ini penting agar pada saatnya negara kita terhindar dari penyakit *moral illiteracy* akut, apalagi jika penyakit itu dialami warga bangsa secara berjamaah. Kita berlindung pada Allah SWT dari sifat demikian.

Meluruskan Kiblat Bangsa

Muhammadiyah melaksanakan Sidang Tanwir di Samarinda, Kalimantan Timur. Permusyawaratan tertinggi setelah muktamar ini dilaksanakan pada 23-25 Mei 2014. Agenda tahunan ini penting karena dilaksanakan dalam suasana menjelang pemilihan presiden (pilpres). Tidak ketinggalan, calon presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla, saat itu juga berkenan hadir. Secara bergiliran, mereka menyampaikan visinya jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Meski dihadiri capres dan cawapres, Muhammadiyah berkomitmen untuk tidak terjebak pada sikap dukung mendukung. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, bukanlah watak Muhammadiyah untuk bermain dalam ranah politik praktis. Yang dimainkan Muhammadiyah adalah politik adiluhung (*high politic*) demi pilpres yang bermartabat. Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi gerakan pencerahan (*al-harakah al-tanwiriyyah*).

Fungsi dakwah yang mencerahkan itulah yang dilakukan Muhammadiyah dalam sejarah perkembangannya. Jika menengok sejarah, konteks kelahiran Muhammadiyah jelas terkait dengan kondisi umat yang terbelakang di segala bidang. Kehidupan berbangsa saat itu juga masih di bawah pengaruh kolonialisme. Di antara kisah populer yang menunjukkan kiprah pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, adalah tatkala beliau meluruskan arah kiblat Masjid Besar Kauman.

Ikhtiar Dahlan itu kemudian memicu konflik dengan pejabat pemerintah, Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat. Akibatnya, musala tempat pengajian Dahlan dan murid-muridnya dirobokkan. Peristiwa perobohan musala itu sama sekali tidak menyurutkan dakwah Dahlan. Dakwah beliau semakin meluas, tidak hanya berhenti pada usaha meluruskan arah kiblat untuk shalat.

Dahlan juga memelopori penggunaan bahasa Jawa dan Melayu untuk berkhotbah, pengelolaan haji, program mubalig keliling, shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, penafsiran Alquran dengan bahasa lokal, dan pembentukan badan amil zakat. Di bidang pendidikan, Dahlan juga mengupayakan terbentuknya sekolah modern dengan sistem klasikal. Kurikulum pendidikannya pun diperbarui dengan mengintegrasikan ilmu umum dan agama.

Dengan sistem ini, Dahlan bermimpi untuk melahirkan ulama-ilmuwan atau ilmuwan-ulama. Pembaruan Dahlan ini ditujukan untuk mengimbangi pendidikan unggul yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda dan umat Kristiani. Di bidang kesehatan, Dahlan juga meletakkan dasar-dasar pembangunan rumah sakit melalui badan yang bernama Penolong Kesejahteraan Oemum (PKO).

Tokoh Budi Utomo, Dokter Soetomo, yang pernah menjabat penasihat Hoofdbestuur (pimpinan pusat) Muhammadiyah bidang kesehatan, merupakan figur yang sangat berjasa dalam pengembangan rumah sakit. Pada 1924, Dokter Soetomo ditunjuk untuk meresmikan Poliklinik PKO Muhammadiyah yang berada di Jalan KH Mas Mansur, Surabaya.

Saat berpidato, Dokter Soetomo menyampaikan alasan dirinya bergabung dengan Muhammadiyah. Ia menyampaikan bahwa paham "kewelasihan" yang diajarkan Dahlan melalui berbagai kegiatan PKO telah memikat hatinya. Tatkala meresmikan PKO Surabaya, Soetomo mengajak undangan untuk menyumbang. Ajakan Soetomo disambut hadirin dengan antusias.

Peristiwa ini menarik karena sebagian besar undangan adalah "noni-noni" Belanda. Dengan sukarela noni-noni Belanda menyerahkan cincin, gelang, dan kalung yang dikenakannya untuk disumbangkan pada Muhammadiyah. Jika melihat kiprahnya, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa semua yang dilakukan Dahlan telah melampaui zamannya.

Akibatnya, Dahlan harus menerima kenyataan dicemooh dan dituduh sebagai antek penjajah dan agen Kristen. Dahlan juga dituduh telah melecehkan agama karena berani melakukan praktik keagamaan yang masih asing. Semua tuduhan dan ancaman itu tidak menciutkan nyali Dahlan untuk berdakwah. Dakwah Dahlan memberantas takhayul, bidah, dan churafat (TBC) semakin menggelora hingga ajal menjemputnya pada 1923.

Kini Muhammadiyah telah sukses melewati usia satu abad. Yang patut disyukuri, Muhammadiyah sejak kelahirannya hingga kini masih konsisten berkiprah untuk menyinari negeri. Muhammadiyah tetap berkhidmat untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar, tanpa sekalipun tergoda menjadi partai politik. Yang menarik dinanti adalah kiprah Muhammadiyah dalam konteks kekinian. Terutama menjelang pilpres yang sangat menentukan masa depan bangsa.

Karena tantangan yang dihadapi saat ini berbeda, orientasi dakwah Muhammadiyah tidak boleh hanya berhenti pada memberantas TBC. Dakwah Muhammadiyah harus mencakup seluruh aspek, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pada awal kelahirannya, ideolog Muhammadiyah berhasil meluruskan arah kiblat shalat, pertanyaannya mampukah generasi Muhammadiyah masa kini meluruskan arah kiblat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu penting karena situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kini sedang menghadapi banyak persoalan. Berbagai persoalan itu meliputi kemandirian bangsa, perekonomian yang tak kunjung beranjak, korupsi yang semakin menjadi, pendidikan yang belum mencerahkan, terorisme, dan dinamika politik yang cenderung memanas jelang pilpres. Untuk itulah, medan dakwah Muhammadiyah harus digeser dari memberantas TBC pada membantu tugas negara agar cepat keluar dari persoalan yang dihadapi.

Dalam bidang politik kebangsaan, dakwah Muhammadiyah

harus mencerahkan rakyat sehingga menjadi pemilih rasional dalam pilpres. Seruan ini penting karena di ujung pilihan rakyat itulah masa depan bangsa dipertaruhkan. Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan keprihatinan mendalam dalam kehidupan berbangsa. Misalnya Muhammadiyah telah memelopori gerakan antikebohongan. Itu dimaksudkan agar elit negeri ini berintegritas dan memiliki kesamaan kata dengan perbuatan.

Muhammadiyah juga bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang terlalu mudah memberikan izin perusahaan asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Hal itu ditunjukkan tatkala Muhammadiyah memelopori pengajuan *judicial review* terhadap keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Ikhtiar Muhammadiyah membuahkan hasil dengan dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, ikhtiar Muhammadiyah saat itu awalnya dicibir karena dianggap tidak berkompeten untuk mengajukan *judicial review* BP Migas.

Harus dipahami, komitmen Muhammadiyah terhadap persoalan Migas merupakan bagian dari ikhtiar untuk meluruskan arah kiblat dalam kehidupan berbangsa. Karena itu menarik dinanti kiprah Muhammadiyah di bidang yang lain.

Bergaji Tinggi Tapi Korupsi

Jika kita membaca media maka hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan kasus korupsi dengan segala bentuk ekspresi budayanya. Pemberitaan kasus-kasus korupsi itu terasa akan semakin heboh jika melibatkan figur populer di negeri ini. Saat membaca berita itulah energi dan emosi publik seakan memuncak. Bagaimana tidak, yang terlibat dalam kasus korupsi itu mayoritas adalah pejabat publik yang diberitakan sangat kaya (*tajir*) dan bergaji tinggi. Lakon utama kasus-kasus yang menghebohkan itu di antaranya adalah Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, dan Akil Mochtar.

Di luar empat tersangka itu tentu masih banyak kasus serupa dan berskala besar. Tetapi yang menarik dari empat tersangka kasus tersebut adalah bahwa mereka sejatinya pejabat publik yang terhormat, kaya, dan bergaji tinggi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, komisi pemberantasan korupsi (KPK) pun tidak ragu menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

Tidak mengherankan jika sebagian besar orang yang mengikuti pemberitaan kasus menghebohkan ini bertanya-tanya, mengapa mereka masih juga tergoda untuk melakukan korupsi? Bukankah kehidupan mereka telah tercukupi dengan begitu banyak fasilitas yang diberikan negara? Harta mereka pasti melimpah. Gaji mereka juga pasti sangat besar.

Lalu, kepuasan apalagi yang hendak mereka cari? Beberapa pertanyaan itu tentu absah untuk dimajukan. Tetapi sejatinya tidak ada yang aneh dengan kasus-kasus yang menghebohkan itu. Karena, sepanjang berkaitan dengan makhluk Tuhan yang bernama manusia, maka semua menjadi serbamungkin. Sebab, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sulit diprediksi.

Dengan kehidupan yang sangat dinamis maka perilaku manusia menjadi sangat sulit diprediksi. Jadi, persis seperti yang diungkapkan Louis Leahy dalam *Manusia Sebuah Misteri* (1989). Dalam buku itu digambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berdimensi banyak. Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia sejatinya memiliki tugas yang sangat terhormat. Yakni, memelihara kehidupan di alam semesta.

Tetapi, jangan lupa manusia juga berpotensi untuk menjadi perusak kehidupan di muka bumi. Karena itulah, Louis Leahy menyebut manusia sebagai makhluk dengan karakter yang paradoks. Itulah sebabnya ilmu-ilmu tentang manusia (*humanity sciences*) tergolong disiplin yang sulit untuk dipahami. Pendek kata, manusia yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu kemanusiaan sangat dinamis dan mudah berubah sehingga tidak dapat ditebak.

Hal itu berbeda dengan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) yang menjadikan segala sesuatu di luar manusia sebagai objek kajian. Dengan karakter yang sangat stabil dan cenderung taat pada ketentuan Tuhan (*sunnatullah*), makhluk selain manusia mudah untuk dijelaskan. Itulah sebabnya banyak ilmuwan dapat memprediksi kejadian alam dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.

Coba bandingkan dengan manusia. Siapa yang dapat menebak apa yang akan dilakukan seseorang pada masa mendatang. Hari ini seseorang menampilkan diri sebagai sosok yang baik, tetapi bagaimana dengan besok. Siapa yang dapat menjamin bahwa besok ia akan tetap menjadi pribadi yang baik?

Dengan menggunakan perspektif dari ilmu-ilmu tentang manusia itulah kiranya kita dapat menjelaskan realitas orang yang sudah

bergaji tinggi tetapi masih melakukan korupsi. Sangat mungkin mereka adalah tipologi manusia yang senantiasa ingin memuaskan keinginan. Padahal yang namanya keinginan pasti tidak pernah berakhir. Keinginan itu laksana orang yang ingin menghilangkan rasa haus dengan minum air laut.

Jika itu dilakukan, maka yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak air laut yang diminum maka akan semakin haus. Jadi, sejatinya manusia tidak akan mampu memenuhi keinginannya. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jika seseorang sudah memiliki satu lembah berisi emas, maka ia pasti akan mencari lembah kedua. Jika lembah kedua yang berisi emas telah diperoleh, ia pun pasti mencari lembah ketiga.

Begitu seterusnya tabiat manusia. Manusia tidak akan pernah merasa puas kecuali setelah mulutnya disumpal dengan tanah alias mati. Hadis ini mengingatkan bahwa jika yang dicari manusia adalah kepuasan, pasti tidak akan ada ujungnya. Tetapi harus diakui, bahwa dalam hidup ini setiap orang selalu dihadapkan pada godaan. Celaknya, godaan itu selalu menyesuaikan dengan kondisi seseorang.

Mereka yang memiliki derajat tinggi seperti pejabat publik, pasti akan berhadapan dengan godaan yang luar biasa. Ibaratnya, semakin tinggi pepohonan maka semakin kencang angin menerpa. Maka, beruntunglah mereka yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Meski godaan terus berdatangan namun dengan fondasi keimanan yang kuat, ia tetap dapat menjaga integritasnya.

Berkaitan dengan kuatnya godaan itulah maka setiap pejabat publik harus diingatkan bahwa kekuasaan itu amanah. Karena kekuasaan itu amanah maka harus dijaga sebaik-baiknya. Bahkan, dalam Alquran ditegaskan bahwa kekuasaan itu sejatinya titipan Allah. Dialah pemilik kekuasaan yang sejati. Dia berkuasa untuk memberikan kekuasaan dan kehormatan pada orang yang dikehendaki.

Sebaliknya, Allah juga berkuasa mencabut kekuasaan dari seseorang dan menjadikannya terhina (QS. Ali Imran: 26). Ketentuan itu jelas termaktub dalam hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Itulah yang terjadi pada diri pejabat publik yang tadinya berkuasa dan terhormat kemudian harus kehilangan semuanya. Bukan hanya kekuasaan yang pergi.

Bahkan, ia harus menerima kenyataan menjadi orang yang

terhinakan. Semua itu harus dipahami sebagai hukum yang tak terelakkan jika seseorang tidak mampu menjaga amanah. Kasus suap yang mengguncang kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini tentu harus dijadikan pelajaran (*ibrah*). Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi, pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama.

Semoga penangkapan pejabat publik yang sudah kaya dan bergaji tinggi tapi masih serakah sehingga melakukan korupsi dapat menjadikan bangsa ini semakin kuat dan bermartabat. Hal itu karena memang tidak ada seorang pun yang benar-benar kebal dari hukum.

Plagiarisme dan Moral Keilmuan

Kasus plagiarisme yang melibatkan akademisi perguruan tinggi kembali terjadi. Kali ini lakonnya adalah Anggito Abimanyu (Anggito), akademisi dan pejabat negara yang dikenal memiliki rekam jejak hebat dan sangat berintegritas. Meski menjadi pejabat negara dan harus menghabiskan waktu di Ibu Kota, Anggito masih tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.

Anggito pun selalu menyempatkan hadir untuk mengajar di UGM, kampus yang membesarkan namanya. Selain sebagai akademisi, Anggito juga menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag). Sebelumnya Anggito menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF Kementerian Keuangan). Di bidang olahraga, Anggito juga dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi).

Beberapa jabatan yang diraih Anggito menunjukkan bahwa beliau sosok yang multitalenta. Dengan talenta yang hebat itulah,

terasa tak percaya tatkala menyimak berita bahwa Anggito tersandung kasus plagiat sehingga harus mundur dari UGM. Pemberitaan di media *online* ternyata juga tidak kalah ramai. Kasus plagiarisme yang melibatkan Anggito mendapat respons yang luar biasa dari pembaca. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk berempati pada Anggito.

Sementara yang lain menganggap kesalahan Anggito termasuk yang tidak dapat ditoleransi di dunia akademik dan karena itu pelakunya harus dihukum. Kasus plagiarisme Anggito bermula dari seorang penulis di *Kompasiana* yang menulis kolom dengan judul *Anggito Abimanyu Menjiplak Karya Orang?* Penulis dengan akun "Penulis UGM" itu mengungkapkan bahwa ada kesamaan redaksi dalam beberapa paragraf dan substansi tulisan Anggito dengan tulisan yang terlebih dulu dimuat di *Kompas*.

Kesimpulan itu diperoleh setelah membandingkan artikel opini Anggito berjudul "Gagasan Asuransi Bencana" (*Kompas*, 10 Februari 2014) dan tulisan Hatbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "Menggagas Asuransi Bencana" (*Kompas*, 21 Juli 2006). Setelah kasusnya ramai diberitakan di media, Anggito pun menggelar konferensi pers. Intinya, Anggito mengakui telah berbuat khilaf karena mengutip tulisan orang tanpa menunjukkan referensi yang jelas. Sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan, Anggito pun memutuskan untuk mundur dari profesi sebagai dosen di UGM.

Keputusan ini memang terasa berat, tetapi harus diambil demi menjaga integritas seluruh sivitas dan institusi UGM. Sangat disayangkan, Anggito harus mengakhiri karier sebagai akademisi karena kasus plagiarisme. Padahal jika melihat rekam jejaknya, kesalahan itu tidak seharusnya dilakukan orang sekaliber Anggito. Sebelum terkena kasus plagiarisme, Anggito termasuk akademisi andal. Anggito begitu dicintai mahasiswanya. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kolega yang kaget dengan kasus yang dialami Anggito. Tak terkecuali Rektor UGM Profesor Pratikno.

Beliau mengatakan bahwa Anggito adalah aset UGM yang sungguh luar biasa. Tetapi, Pak Rektor lantas memungkasi pernyataan dengan mengatakan bahwa kejujuran akademik juga menjadi aset yang luar biasa bagi UGM. Pernyataan ini terasa sangat tepat karena kejujuran akademik (*academic honesty*) bagi perguruan tinggi adalah segala-galanya. Bayangkan, jika ada perguruan tinggi divonis *stakeholders*-nya sebagai tidak berintegritas, runtuhlah kewibawaan

dan kehormatan (*marwah*) kampus tersebut.

Memang sempat muncul dugaan bahwa yang menulis artikel opini itu bukan Anggito, melainkan anak buahnya. Dugaan ini berdasarkan kebiasaan pejabat publik yang selalu menggunakan jasa penulis (*ghost writer*). Melalui jasa penulis inilah pejabat publik selalu menulis di media untuk mencitrakan dirinya intelek dan berpendidikan (*well educated*). Tetapi, dugaan itu ditepis Anggito.

Kasus yang dialami Anggito seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa pun. Jangan karena terdorong untuk mencitrakan diri sebagai penulis produktif, lalu mengindahkan nilai-nilai moral kejujuran. Apalagi jika sampai melakukan praktik plagiarisme. Dalam kaitan ini plagiarisme atau plagiat dapat diartikan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapat sendiri.

Dengan demikian, plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Karena itulah, plagiarisme harus menjadi perhatian seluruh sivitas akademika, terutama di perguruan tinggi. Kasus plagiarisme tidak boleh terus-menerus terjadi. Rasanya sudah waktunya setiap perguruan tinggi menggunakan *software* untuk mencegah plagiarisme. Tetapi, jika memang belum ada *software* yang memadai, cara efektif untuk mencegah plagiarisme adalah mendorong sivitas akademika untuk memublikasikan hasil karyanya.

Publikasi buku, hasil penelitian, artikel jurnal, opini koran, apalagi jika dilakukan secara *online*, pasti efektif untuk mencegah plagiarisme. Jika ada seseorang yang tidak jujur misalnya mengambil artikel melalui bantuan "Mbah Google" dan menganggap itu tulisannya, dengan mudah akan diketahui karena banyak orang yang mengakses. Satu lagi yang juga sangat mendasar adalah mengandalkan moral keilmuan dari setiap akademisi. Doktrin utama yang harus ditanamkan pada akademisi adalah sebagai pribadi yang memiliki keterbatasan boleh saja ia melakukan kesalahan.

Yang tidak boleh adalah melakukan kebohongan. Itu berarti, bisa saja seorang akademisi melakukan kesalahan dalam menganalisis dan menyimpulkan. Yang penting semua data dan fakta dikemukakan secara jujur dan apa adanya. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, harus menyadari bahwa kejujuran itu jauh lebih penting dari segalanya. Bahkan gelar keserjanaan (S-1, S-2, dan S-3) dan gelar tertinggi akademik (profesor)

tidak akan bermanfaat jika ditempuh dengan cara yang tidak jujur.

Karena itu, mari mencegah praktik plagiarisme dengan mengandalkan moral kejujuran. Tidak usah menunggu orang lain untuk berbuat jujur. Marilah mulai dari diri sendiri dengan menjadi akademisi yang berintegritas.

Intelektual dan Kekuasaan

Dinamika politik nasional dan lokal telah menghadirkan fenomena yang menarik berupa polarisasi kaum intelektual dalam berbagai kelompok kepentingan. Kaum intelektual ini umumnya bergabung sebagai aktivis partai, tim sukses calon, konsultan politik, dan tenaga profesional untuk survei. Karena itu tidak mengherankan jika kini menjamur beberapa lembaga survei yang siap dimanfaatkan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif, untuk mengetahui tingkat popularitas dan akseptabilitasnya.

Bukan hanya untuk kepentingan personal calon, lembaga-lembaga survei itu juga dapat dimanfaatkan untuk melihat popularitas partai politik (parpol) yang akan *running* dalam Pemilu 2014. Parpol dan para calon dalam kaitan ini jelas membutuhkan masukan dari komunitas akademik berkaitan dengan isu yang harus diwacanakan agar dapat diterima publik. Variabel akseptabilitas ini penting karena sekaligus dapat digunakan untuk mengukur popularitas partai dan calon.

Sementara masukan mengenai isu yang akan diwacanakan jelas bermanfaat bagi parpol dan calon agar dapat menawarkan program sesuai kondisi sosial budaya masyarakat masing-masing. Keterlibatan kaum intelektual tentu menarik diamati karena terjadi dalam setiap pemilu, terutama sepanjang era reformasi. Kaum intelektual dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk mempertajam visi, misi, serta program parpol dan para calon. Pelibatan kaum intelektual ini jelas dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Kaum intelektual di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga profesional untuk melakukan kajian mengenai kondisi masyarakat dan harapan yang diinginkan. Melalui kegiatan inilah parpol dan para calon mendapatkan gambaran mengenai kondisi riil di lapangan serta strategi yang tepat untuk menarik simpati dan membangun kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, data riil di lapangan jelas bermanfaat bagi tim sukses untuk diolah menjadi isu menarik yang akan disampaikan dalam kampanye. Hampir dapat dipastikan jika kondisi masyarakat setiap daerah sangat berbeda. Keragaman kondisi masyarakat jelas membutuhkan strategi yang berbeda. Karena itulah substansi isu kampanye dan strategi menyampaikannya pun harus dikemas dengan cara yang berbeda.

Sebagai contoh, isu tentang banjir dan penanggulangannya barangkali menarik dijadikan bahan kampanye di daerah tertentu. Tetapi isu banjir pasti tidak relevan disampaikan di daerah yang tidak rawan banjir. Isu tentang kemacetan juga bisa relevan untuk daerah tertentu dan tidak relevan untuk daerah lain. Demikian juga isu tentang *good governance* dan pemberantasan korupsi. Dua isu ini jelas sangat elitis sehingga hanya cocok disosialisasikan pada kelompok yang terbatas dan terdidik.

Sementara untuk rakyat kebanyakan akan sangat bergairah jika ditawarkan program pendidikan dan kesehatan gratis, kemudahan memperoleh bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, kesempatan mendapat pekerjaan, dan peningkatan pelayanan sosial lainnya. Persoalannya, dengan melibatkan diri dalam pertarungan bersama masing-masing parpol dan calon tertentu, apakah kaum intelektual tidak dapat dikatakan telah melakukan pengkhianatan?

Sebutan pengkhianatan intelektual pernah dikemukakan Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals*. Melalui karya ini, Benda mengkritik tajam kaum intelektual Prancis yang mendukung

Perang Dunia I dan II. Karena itulah Benda tidak mau menyebut dirinya sebagai kaum intelektual. Dalam konteks keindonesiaan, kaum intelektual dari berbagai latar belakang juga melibatkan diri dalam kegiatan partai dan turut menyukseskan calon tertentu.

Bahkan bisnis yang laris manis di era politik yang mengandalkan popularitas ini adalah konsultan politik dan survei. Bisnis yang dikelola kaum intelektual ini pasti menghadirkan keuntungan ekonomi yang luar biasa. Pelibatan kaum intelektual dalam politik memang sensitif karena selama ini dunia intelektual sangat identik dengan kebebasan dan independensi. Pertanyaannya, apakah dengan menjadi aktivis partai, tim sukses, konsultan, tim survei, untuk kepentingan partai dan calon tertentu tidak mengesampingkan kemandirian kaum intelektual?

Pertanyaan ini biasanya muncul dari kelompok intelektual idealis. Mereka yang berpandangan idealis umumnya ingin menunjukkan diri sebagai kelompok intelektual yang selalu berada di menara gading, tanpa mau melihat realitas di lapangan. Sementara itu, ada kelompok lain yang berpandangan bahwa kaum intelektual tidak boleh terus-menerus berada di menara gading. Kaum intelektual harus segera keluar dengan menjadi aktivis untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya.

Karena persoalan politik berkaitan dengan kepentingan publik, maka berarti kaum intelektual juga harus melibatkan diri. Hanya dengan cara inilah kaum intelektual dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk turut mempengaruhi kebijakan agar partai penguasa dan calon pemimpin menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Memahami keberadaan kaum intelektual yang demikian penting, tidak mengherankan jika parpol dan para calon yang akan *running* dalam pemilu melibatkan mereka.

Terlepas dari kontroversi pelibatan kaum intelektual dalam politik praktis, keberadaan mereka dirasa sangat penting. Kaum intelektual dapat dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku calon pemilih (*voting behaviour*). Dalam perspektif teori sosial, pelibatan kaum intelektual ini juga dapat dipahami sebagai cara elit parpol dan calon penguasa untuk melakukan hegemoni pada masyarakat.

Setidaknya pada tingkat tertentu masyarakat akan memersepsi bahwa elit parpol dan calon penguasa telah didukung oleh sederetan kaum intelektual sehingga bersifat *well educated*. Akhirnya, semoga

kaum intelektual yang terlibat dalam proses politik di negeri ini atau yang telah dekat dengan kekuasaan tetap menjaga integritas moral dan intelektualnya sehingga tidak larut dalam berbagai kepentingan praktis-pragmatis.

Susahnya Menjadi Bangsa yang Jujur

Jika menyimak pemberitaan beberapa kasus besar yang terjadi di negeri ini maka terasa sekali bahwa ada misteri yang harus diungkap secara jujur. Kasus suap impor daging sapi dapat menjadi salah satu contoh. Kasus yang menyeret sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menempatkan Ahmad Fathanah (AF) sebagai lakon. Juga ada nama mantan presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq (LHI) dan Menteri Pertanian Suswono, yang juga kader PKS. Meski saling mengenal, namun saat diminta kesaksian di pengadilan mereka memberikan keterangan yang berbelit dan tidak nyambung. Fakta ini menunjukkan bahwa ada ketakjujuran diantara mereka.

Tidak jelas, siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dalam kasus tersebut. Yang pasti publik harus menahan kesabaran untuk menanti akhir dari drama kasus suap impor daging sapi. Apalagi dalam percakapan yang diputar di pengadilan antara AF dan LHI ternyata banyak menggunakan kata sandi seperti *Pustun*, *Jawa Syarqiyah*, *Daging Busuk*, dan *Arba'in*. Bahkan sebagian percakapan AF dan LHI dilakukan dalam bahasa Arab. Penggunaan kata sandi

dan bahasa Arab itu semakin menambah misteri kasus tersebut.

Ketakjujuran ternyata bukan hanya terjadi dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Dalam kasus mega skandal proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang dan kasus suap cek perjalanan yang menyertai pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom, publik juga mendapati penjelasan yang saling bertolak belakang dari masing-masing oknum. Fenomena itu jelas menjadi pekerjaan rumah bagi aparat untuk mengungkap siapa yang memberikan kesaksian palsu.

Daftar kasus besar yang hingga kini masih misterius adalah pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjarn, Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini tergolong heboh karena melibatkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Berdasarkan bukti-bukti selama persidangan, Antasari telah diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Tetapi karena merasa dihukum melalui proses pengadilan yang menyesatkan, Antasari terus berikhtiar untuk mencari keadilan.

Penyelesaian kasus Bank Century juga belum menunjukkan perkembangan. Padahal dana trilyunan rupiah telah digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century. Banyak dugaan menyertai kasus Bank Century. Tetapi sayang sekali, sejauh ini publik belum mendapat kejelasan dari kasus yang begitu menguras energi. Kasus lain yang juga menarik ditunggu adalah dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret beberapa jenderal di lingkungan Mabes Polri.

Dari beberapa kasus yang menghebohkan tersebut tampak bahwa ada ketakjujuran yang dilakukan masing-masing oknum. Bahkan terasa ada sutradara dibalik rekayasa sejumlah kasus besar tersebut. Dengan skenario yang dirancang, untuk sementara waktu sang sutradara berhasil memainkan emosi publik. Sehingga tanpa disadari, publik masuk dalam alur cerita yang menyesatkan.

Ibarat sebuah permainan, sang sutradara dapat dikatakan sedang bermain api. Sang sutradara mungkin tidak menyadari bahwa ada hukum tak terelakkan; "Barang siapa yang bermain api maka pasti akan terbakar." Itu berarti bahwa siapa yang berbohong dalam kasus-kasus besar tersebut pasti akan ketahuan belangnya. Kalau tidak hari ini, mungkin esok, atau kapan pun waktunya. Sejarah yang akan menjawab dengan pasti kapan kebohongan itu terungkap. Yang jelas, cepat atau lambat kejujuran pasti akan mengalahkan

kebohongan.

Dalam agama diajarkan bahwa kejujuran itu adalah sifat yang sejalan dengan hati nurani. Sebaliknya, kebohongan digambarkan sebagai sifat yang bertentangan dengan hati nurani. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa kejujuran itu akan menghadirkan ketenangan, sementara kebohongan membuat pelakunya senantiasa ragu-ragu (HR. Tirmidzi). Sabda Nabi yang mengaitkan kebohongan dan keragu-raguan menarik dicermati. Itu berarti orang yang selalu ragu dalam mengambil keputusan rasanya ia patut diduga melakukan ketakjujuran.

Karena itulah kita harus menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi dalam membangun kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam kaitan ini layak direnungkan pernyataan Abraham Lincoln, Bapak Kemerdekaan dan Presiden Amerika Serikat ke-16. Beliau pernah berujar; *You can make fool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time* (anda dapat menipu semua orang untuk sementara waktu, sebagian orang untuk sepanjang waktu, tetapi anda tidak mungkin menipu semua orang untuk sepanjang waktu).

Pernyataan itu memberikan pelajaran bahwa sejatinya tidak ada ruang yang aman untuk menyimpan kebohongan. Pada saatnya kebohongan pasti akan terbongkar sehingga kita mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Rasanya publik sudah muak dengan semua ketakjujuran yang terjadi di negeri tercinta ini.

Saat Akil (Makan) *Kemaruk*

Seorang kolega yang juga guru besar tafsir di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel pernah berseloroh. Ia mengatakan bahwa Akil Mochtar ditangkap basah KPK dalam dugaan kasus suap disebabkan salah nama. Hal itu karena menurut pakar tafsir ini, kata *akil* dalam bahasa Arab jika dieja dengan huruf alif, kaf, lam, berarti makan atau memakan.

Berbeda dengan kata '*aqil* dengan ejaan 'ain, qaf, lam. Kata terakhir ini ('*aqil*) berarti orang yang berakal, berpikir, dan bernalar dengan jernih. Saya meyakini, tatkala orang tua memberi nama anaknya dengan kata 'akil', sejatinya yang dimaksud adalah 'aqil. Dengan nama 'aqil, orang tua pasti menginginkan agar pada saatnya nanti anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas sehingga mampu menggunakan akal pikirannya. Bukankah akal merupakan anugerah terbesar dari Tuhan?

Bahkan akal pikiran menjadi pembeda yang jelas antara manusia dan hewan. Dengan akal pikiran yang jernih maka seseorang senantiasa akan berhati-hati dalam bertutur kata, bersikap, dan

bertindak. Jadi, kata 'akil' yang melekat pada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, semestinya tidak bermakna memakan. Apalagi memakan apa saja yang dapat dimakan. Jadi, Akil Mochtar itu semestinya bukan pemakan apa saja (kemaruk), sehingga tidak peduli halal atau haram. Apalagi beliau adalah pejabat tinggi negara yang terhormat.

Tetapi jika melihat perkembangan kasus Akil Mochtar tampaknya guyonan guru besar tafsir itu ada benarnya. Akil Mochtar seakan ingin memanfaatkan jabatannya sebagai ketua MK untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan jalan yang tidak sah. Tumpukan kasus sengketa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) telah membuka pikiran jahat Akil. Dengan sangat vulgar, Akil memainkan begitu rupa kasus sengketa yang melibatkan pasangan calon dalam pilkada sebagai mesin uang.

Tidak tanggung-tanggung, rumah dinas pejabat tinggi negara pun disulap menjadi tempat bisnis keputusan sengketa pilkada. Kesaksian Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainuddin Amali, yang mengaku pernah dihubungi melalui pesan *BlackBerry Messenger* (BBM) semakin menunjukkan belang Akil. Melalui komunikasi BBM, dengan tanpa tedeng aling-aling, Akil minta disiapkan uang Rp10 miliar untuk menjamin kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam pemilihan gubernur Jatim. Kebetulan saat itu pesaing terkuat Karsa, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja, mengajukan gugatan di MK.

Untungnya permintaan itu tidak digubris pasangan Karsa hingga Akil ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas pada 2 Oktober 2013. Jika semua yang dipersangkakan KPK benar, maka dapat dibayangkan berapa banyak keuntungan Akil dari bisnis keputusan MK. Hal itu karena tumpukan kasus sengketa pilkada di Tanah Air sungguh luar biasa. Hingga dapat dipahami kalau Akil tidak memiliki tempat yang layak untuk menyimpan uang.

Uang Akil pun disimpan di ruang karaoke, kompleks perumahan dinas MK. Mantan Ketua MK Mahfud MD pun menyamakan perilaku Akil dengan Presiden Tunisia Ben Ali yang menyimpan uang di ruang perpustakaan. Sebagai pejabat tinggi negara, Akil sejatinya sudah banyak memperoleh fasilitas seperti gaji tinggi, mobil mewah, rumah dinas, dan sejumlah tunjangan. Jika tidak terlalu banyak makan dan berpolah, penghasilan Akil sebagai pejabat

tinggi negara sudah lebih dari cukup untuk menikmati hidup.

Tetapi tabiat kekuasaan memang selalu menghadirkan godaan. Penguasa yang tahan menghadapi godaan pasti akan selamat. Sebaliknya, yang tidak tahan godaan pasti akan tergelincir. Akil termasuk pejabat yang tidak tahan godaan. Karena itulah Ibnu Khaldun dalam *The Muqaddimah an Introduction to History* (1989), mengingatkan bahwa kekuasaan itu jika tidak dijalankan dengan amanah pasti akan membawa kerusakan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tabiat kekuasaan itu selalu menghendaki berada di satu tangan, *the royal authority, by its very nature, must claim all glory for it self.*

Tabiat kekuasaan juga selalu menghendaki kemewahan, *the royal authority, by its very nature, requires luxury.* Sedangkan kemewahan pada saatnya merusak akhlak pejabat dan menyebabkan kehancuran negara. Peringatan senada juga dikemukakan Lord Acton tatkala menulis surat pada Bishop Mandell Creighton. Dalam surat itu, Acton menulis ungkapan yang terkenal hingga kini, yakni *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.* Orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.

Peringatan Ibnu Khaldun dan Acton layak dijadikan pengingat bagi pemegang kekuasaan agar tidak salah jalan. Tingkah polah Akil memang mengundang emosi publik. Bukan saja orang awam yang kecewa. Mahfud MD juga dibuat berang. Akibat perilaku Akil, kewibawaan MK seakan runtuh. MK terus menjadi pergunjangan publik. Mereka yang pernah beperkara di MK bahkan menuntut agar putusan kasus sengketa pilkada yang melibatkan Akil dibuka kembali.

KPK pun terus menyelidiki modus kejahatan Akil. Hasilnya sungguh luar biasa. Akil diketahui memiliki harta kekayaan yang melimpah berupa rumah, kendaraan, uang, dan properti lainnya. Semua properti Akil disita KPK karena diduga diperoleh dari jalan yang tidak benar. Kasus yang menimpa Akil harus menjadi pelajaran bagi pejabat publik di negeri ini. Bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kekuasaan pasti akan berhadapan dengan aparat.

Apalagi jika kekuasaan itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Siapa pun yang menjabat harus menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah. Amanah berupa kekuasaan pasti silih berganti,

datang dan pergi (QS. Ali 'Imran: 26). Itulah hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan menjabat dan berkuasa terus-menerus. Karena itu, pejabat harus menggunakan kesempatan saat menjabat dengan bekerja sepenuh hati. Hal ini penting agar saat turun dari tahta, seorang pejabat tidak memiliki persoalan hukum.

Romli *Effect* untuk Integritas Kemenag

Akhir tahun 2013, negeri ini digegerkan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agama dengan aktor utamanya Romli. Romli adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri yang dijerat kasus gratifikasi berupa penerimaan honor jasa kepenghuluan. Modusnya, Romli memungut biaya melebihi tarif resmi pernikahan. Padahal, tarif resmi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp. 30.000 untuk setiap pernikahan. Selama setahun (Januari-Desember 2012) bertugas sebagai kepala KUA, Romli diduga menerima gratifikasi jasa kepenghuluan hingga Rp. 42 juta.

Sejawat lewat Forum Komunikasi Kepala KUA di Jawa Timur menilai, perlakuan terhadap Romli tersebut merupakan bentuk kriminalisasi profesi kepenghuluan. Para penghulu pun memutuskan untuk mogok. Para petugas negara yang biasanya siap siaga melayani pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja tersebut tidak lagi bersedia memenuhi undangan keluarga mempelai.

Dampaknya, pencatatan nikah harus dilaksanakan pada jam kerja di KUA mulai Januari 2014. Selain patut disayangkan, ancaman

itu bisa disebut “keangkuhan profesi”, layaknya kasus mogok dokter dan mogok guru. Sebab, sebagai pemegang “monopoli” pencatatan pernikahan, semestinya mereka mengimbangi dengan pelayanan yang berstandar baik.

Layanan pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja sejauh ini telah membudaya. Biaya pencatatan nikah pun berlipat tatkala mengundang petugas pencatat nikah (P2N) di luar kantor dan jam kerja. Namun, berapa pun tarifnya pasti akan dibayar keluarga mempelai. Buktinya, dalam penyelidikan Kejari Banyuwangi terhadap KUA Glenmore, pungli itu mencapai Rp. 300 ribu sampai Rp. 5 juta.

Pernikahan merupakan saat-saat yang membahagiakan sehingga tidak terasa jika harus mengeluarkan banyak uang, termasuk untuk jasa kepenghuluan. Tetapi, persoalannya, pemberian “salam tempel” tersebut bisa memberatkan mempelai yang tidak mampu. Karena itulah, Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Mohammad Jasin menegaskan bahwa uang yang diberikan sebagai jasa kepenghuluan di luar kantor dan jam kerja yang melebihi tarif resmi merupakan gratifikasi. Itu berarti, tindak pidana.

Idealnya, masyarakat harus mencatatkan pernikahan di KUA pada jam kerja agar tidak mengeluarkan biaya lebih. Tetapi, realitas menunjukkan, kebanyakan merasa lebih nyaman jika pencatatan pernikahan dilakukan di luar kantor dan jam kerja. Misalnya, di rumah atau masjid. Inilah dilemanya.

Para penghulu bisa juga beralasan bahwa keluarga mempelai memberikan uang transpor secara sukarela. Sebagai ungkapan rasa syukur, keluarga mempelai memberikan amplop (berisi uang, tentu). Tetapi, praktik “salam tempel” itu bisa menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan transparansi serta akuntabilitas dana jasa kepenghuluan.

Karena itu, jangan heran jika dalam praktiknya, seperti diakui Romli, uang jasa kepenghuluan tersebut dibagikan ke mana-mana. Sebagian masuk kas KUA berdasar tarif resmi. Sebagian lagi dinikmati P2N yang melaksanakan tugas kepenghuluan. Yang menarik adalah pengakuan Romli bahwa ada setoran kepada pejabat terkait di lingkungan Kemenag. Romli bahkan menyatakan, praktik memberikan upeti kepada pejabat Kemenag itu sudah membudaya di seluruh Nusantara. Terang saja pernyataan Romli itu menjadi tamparan bagi pejabat Kemenag di kabupaten/kota dan provinsi.

Kasus gratifikasi jasa kepenghuluan ternyata sangat memengaruhi rapor integritas Kemenag. Dalam survei integritas oleh KPK pada November 2011, Kemenag diposisikan di nomor buncit. Salah satu indikatornya adalah maraknya kasus gratifikasi jasa kepenghuluan yang melibatkan P2N di KUA. Mestinya itu mencoreng Kemenag. Bermoto "Ikhlās Beramal", Kemenag semestinya menjadi benteng kebobrokan moral bangsa.

Kasus yang dialami Romli bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Karena itu, kejadian tersebut harus dijadikan pintu masuk untuk mewujudkan budaya berintegritas. Sudah saatnya Kemenag merumuskan sistem yang terukur untuk mengatur biaya pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja seperti yang diminta Gubernur Jatim Soekarwo. Selain sudah menjadi kebiasaan, fasilitas di banyak KUA sangat terbatas dan memprihatinkan.

Kepastian regulasi tersebut mutlak dibutuhkan sebagai ikhtiar untuk membangun budaya berintegritas setiap pegawai Kemenag, termasuk para penghulu. Kemenag harus menjaga *marwah* profesi penghulu. Semoga pegawai dan institusi Kemenag semakin berintegritas hingga layak disebut departemen "suci". Pendapatan pegawainya pun *halalan thayiban*.

Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan

Praktik korupsi di negeri ini telah begitu rupa sehingga mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kian rapuh. Indikatornya, meski satu persatu kasus korupsi berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun kasus serupa justru bermunculan. Ibarat satu kasus berhasil diselesaikan, seribu kasus lain menunggu proses pengadilan. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditangkap dan ditahan akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik adalah penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Penetapan Andi oleh KPK ini layak diapresiasi. Itu karena saat ditetapkan sebagai tersangka posisi Andi adalah menteri yang masih aktif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Di samping itu, Andi dikenal sebagai salah seorang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Andi juga tercatat sebagai sekretaris

Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Adapun ketua Dewan Pembinanya tidak lain Presiden SBY. Fakta ini menunjukkan betapa dekat hubungan personal dan profesional Presiden SBY dan Andi. Publik layak berharap agar perkembangan kasus korupsi proyek Hambalang tidak berhenti di sini.

Penetapan Andi sebagai tersangka harus menjadi *entry point* bagi aparat untuk mengungkap lebih jauh praktik korupsi dalam kasus lain yang selama ini telah menjadi perhatian publik. Jika aparat pengadilan mampu membuktikan dugaan yang dipersangkakan, meminjam istilah Lord Acton, maka itu berarti Andi telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dua abad silam, dalam surat yang ditulis pada Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pernah menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dan kekuasaan. Acton berkata jelas sekali: *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut pasti akan menyalahgunakannya.

Karena praktik korupsi telah begitu rupa menggerogoti bangsa ini, maka semangat memberantas korupsi harus terus dikobarkan. Para pejuang antikorupsi tidak boleh pesimistis hanya karena melihat begitu banyak kasus korupsi. Ini berarti perang melawan korupsi harus tetap menjadi agenda besar bangsa. Sebab, korupsi merupakan salah satu penyakit peradaban yang dapat melumpuhkan bangunan sebuah bangsa dan negara.

Harus ada kesepahaman di kalangan pejuang antikorupsi bahwa korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan bangsa. Agar keinginan untuk memberantas korupsi tercapai maka yang harus dilakukan para pejuang antikorupsi adalah menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Senada dengan itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan pernah mengingatkan bahwa memerangi korupsi tidak cukup jika hanya ditempuh dengan cara menggelorakan gemuruh perlawanan dan pekik antikorupsi.

Peringatan Anies ini penting dikemukakan karena salah satu faktor yang sangat mungkin memengaruhi lambatnya kinerja lembaga-lembaga antikorupsi adalah belum menggunakan strategi yang tepat. Salah satu pilihan strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan. Ada tiga

alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini. *Pertama*, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) untuk memberikan pencerahan terhadap kesalahan dalam pemberantasan praktik korupsi. Sejauh ini definisi korupsi baru dipahami sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal.

Sementara praktik korupsi dalam berbagai bentuk telah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat mulai tingkat atas hingga rakyat jelata pun mengenal praktik korupsi dalam berbagai budaya. Dalam konteks budaya yang beragam, masyarakat bahkan menyamakan praktik korupsi dengan beberapa istilah. Seperti dikemukakan Mochtar Lubis (1988), ekspresi korupsi telah mewujud dalam praktik pemberian uang sogokan, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar atau pelumas, dan parsel lebaran.

Bahkan untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan terkadang tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya. Berkaitan dengan budaya ini lembaga pendidikan dapat menekankan agar pejabat publik dan masyarakat berhati-hati dengan ekspresi korupsi yang terselubung.

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi sebagai gerakan yang bersifat massif. Apalagi jika dalam gerakan tersebut seluruh sumber daya institusi pendidikan dapat dilibatkan mulai pimpinan, dosen/guru, mahasiswa/ siswa, karyawan, dan *stakeholders* yang ada. Dengan gerakan yang massif diharapkan pada saatnya nanti bangsa ini dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga, jika dilihat secara jujur sejatinya praktik korupsi di negeri ini banyak melibatkan kalangan terdidik. Mereka umumnya alumni dari satuan lembaga pendidikan. Bahkan di antara mereka juga pernah mengenyam pendidikan tinggi. Kasus yang menimpa Andi seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Orang dengan latar belakang pendidikan mapan sekalipun dapat diduga terlibat praktik korupsi. Itu bisa jadi karena sistem di negeri ini sudah sangat korup.

Akibatnya, siapa pun yang masuk sistem pasti akan sulit menghindari budaya korupsi. Andi dan kalangan terdidik lain yang ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan yang telah dinyatakan

bersalah dalam kasus korupsi bisa jadi merupakan korban dari sistem administrasi negara yang tidak pernah dikuasainya dengan baik. Itu karena tatkala kalangan terdidik belajar di lembaga pendidikan, belum mendapat materi tentang tindakan yang termasuk kategori korupsi.

Jika hipotesis ini benar, berarti ikhtiar untuk memasukkan materi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan mutlak dilakukan. Ikhtiar untuk mengembangkan materi pemberantasan korupsi di setiap satuan pendidikan ini harus didukung agar lembaga pendidikan tidak dikatakan turut memproduksi koruptor.

Cendekiawan Pejuang Antikorupsi

Jika mengamati kasus korupsi di negeri ini, tampak sekali bahwa sebagian besar pelakunya kalangan terdidik. Rata-rata mereka adalah alumni pendidikan tinggi bergelar sarjana (S-1), master (S-2), dan doktor (S-3). Bahkan ada pelaku korupsi yang bergelar guru besar. Padahal pada saat berstatus akademisi di kampus, sang guru besar dikenal memiliki rekam jejak hebat.

Fenomena kasus korupsi yang melibatkan kalangan terdidik jelas menjadi ironi bagi dunia pendidikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa pelaku korupsi kini tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI Polri, dan pengusaha. Kalangan akademisi dari kampus pun berpotensi menjadi pelaku korupsi. Pertanyaannya, mengapa mereka terseret dalam pusaran kasus korupsi?

Padahal mereka termasuk kelompok terdidik. Mereka bahkan dikenal memiliki rekam jejak yang hebat tatkala masih aktif sebagai pendidik. Jawabnya, karena mereka terlalu jauh bersinggungan dengan kekuasaan. Di samping itu, mereka juga tidak siap tatkala

berurusan dengan birokrasi dan segala aturan administrasinya. Karena itulah, Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals* (Pengkhiatanan Kaum Intelektual, 1980) berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan kekuasaan.

Pesan Julien tersebut penting agar kalangan terdidik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Peringatan yang sama sebenarnya juga diutarakan Lord Acton ketika menulis surat pada Bishop Mandell Creighton. Dalam surat itu dia menulis ungkapan yang terkenal hingga kini, yaitu *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.

Karena itulah, Julien mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saat bersinggungan dengan kekuasaan. Modal yang juga sangat penting dimiliki kaum cendekiawan adalah moral atau akhlak. Modal berupa akhlak ini terasa bersifat universal karena berlaku bagi siapa saja. Persoalan akhlak penting karena berkaitan dengan integritas seseorang.

Buya Syafi'i Maarif, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa perspektif moral dapat digunakan untuk menilai apakah seorang yang terdidik telah berkhianat, terpeleset, tertipu, khilaf, naif, atau tidak paham dengan medan pergaulan sehingga salah dalam mengambil langkah. Dalam konteks inilah masyarakat dapat menilai moralitas mereka yang terdidik, tetapi tersandung kasus korupsi. Apakah mereka sekedar khilaf ataukah benar-benar terlena dengan godaan politik dan kekuasaan.

Dengan ilmu yang dimiliki, kalangan cendekiawan perguruan tinggi seharusnya tampil sebagai pahlawan antikorupsi. Tetapi, sayang sekali, realitas justru berkata lain. Seakan menyadari bahwa ada begitu banyak kalangan terdidik yang terlibat kasus korupsi kini dikembangkan pendidikan antikorupsi. Di beberapa perguruan tinggi, kurikulum pendidikan antikorupsi pun didisain dengan cara yang beragam.

Ada yang menjadikan mata kuliah mandiri. Ada juga yang menyisipkan (*inserting*) materi antikorupsi pada beberapa mata kuliah yang telah ada. Pengembangan materi pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menjadikan kalangan terdidik sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas. Agar dampaknya lebih massif, kurikulum

pendidikan antikorupsi seharusnya tidak hanya dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi. Materi pendidikan antikorupsi juga harus dikembangkan di pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Dengan mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, diharapkan budaya berperilaku jujur tertanam dalam diri kalangan terdidik. Pelibatan lembaga pendidikan untuk mendorong munculnya cendekiawan sekaligus pahlawan antikorupsi melalui pengembangan pendidikan integritas penting dilakukan. Paling tidak ada dua modal yang telah dimiliki sehingga lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam gerakan mewujudkan anak-anak bangsa yang berintegritas.

Pertama, lembaga pendidikan memiliki sumber daya dengan seperangkat pengetahuan (*knowledge*) yang sangat memadai. *Kedua*, lembaga pendidikan memiliki jaringan (*networking*) yang kuat dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jika dua modal ini dimaksimalkan, akan muncul gerakan pemberantasan korupsi yang massif.

Bangsa ini jelas banyak berharap pada dunia pendidikan. Bukankah mereka yang sedang belajar di sekolah dan PT merupakan calon pemimpin negeri ini di masa mendatang? Jika kini kalangan cendekiawan sudah banyak yang belepotan dengan noda korupsi, pada siapa lagi bangsa ini berharap? Pertanyaan ini layak direnungkan.

Pahlawan yang telah gugur mendahului kita jelas tidak ingin melihat generasi penerusnya terpeleset berulang kali dalam pusaran kasus korupsi dengan berbagai ekspresi budayanya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kalangan cendekiawan harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Para pahlawan yang telah gugur pasti tidak menuntut kita mengangkat senjata dan mempertaruhkan nyawa.

Yang diminta hanya kobarkan terus perjuangan melawan korupsi dan antek-anteknya. Bebaskan negeri ini dari kasus korupsi sehingga lebih bermartabat. Itulah cara terbaik untuk membahagiakan para pahlawan di alam baka sana.

Mendengar Koreksi RUU Ormas

Polemik mengenai rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas) terus menggelinding. Hal itu tampak dari pernyataan sikap sejumlah Ormas dalam keputusan resmi organisasi, diskusi publik, dan demonstrasi. Desakan agar pasal-pasal kontroversial segera direvisi begitu kuat. Bila tidak, begitu disahkan jadi UU Ormas, Ormas-ormas itu telah berancang-ancang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan legislatif selayaknya mendengar suara kritis ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal termasuk yang telah bersikap tegas menolak RUU ormas. Sikap itu diambil karena menurut hasil telaah Muhammadiyah, RUU ormas yang dibahas di DPR dapat membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpotensi menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politik. Dalam pertemuan di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setidaknya ada 96 ormas lain yang juga menolak.

Sementara, PB NU mengusulkan pembahasan RUU ditunda terlebih dulu hingga ada titik temu, terutama terkait pasal-pasal

yang masih diperdebatkan. Sikap beberapa ormas tersebut dapat dipahami karena mereka ingin memastikan bahwa RUU Ormas tidak menjadi pemasung. Apalagi, ormas sekelas Muhammadiyah dan NU yang telah banyak berkiprah dan berusia jauh lebih tua dari negeri ini.

Ormas ingin RUU itu menjamin kebebasan berserikat, sementara pemerintah berkepentingan mengendalikan Ormas. Dalam perspektif pemerintah, UU No 8/1985 tentang Ormas dianggap tidak lagi mampu mengikuti perkembangan. Itu karena perkembangan ormas, terutama pada masa reformasi, terasa sangat dinamis dan meriah.

Alasan lain yang dimajukan pemerintah adalah keberadaan Ormas anarkistis yang sering mengganggu masyarakat dan merongrong kewibawaan pemerintah. Dalam aksinya ormas anarkistis telah memanfaatkan simbol-simbol agama atau simbol negara. Padahal, Jalaluddin al-Suyuthi, ulama besar dan mujadid Islam, menyatakan bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan tugas tersebut. Menurut al-Suyuthi, hanya ulama dan penguasa yang dapat bertugas amar ma'ruf nahi munkar. Ulama mengembang tugas itu karena memiliki ilmu, sedangkan penguasa memiliki kekuasaan.

RUU Ormas juga dirancang untuk mengatur keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang didirikan WNI maupun warga asing. Dalam penilaian pemerintah, keberadaan LSM harus diatur agar kiprahnya dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional. LSM yang dikelola orang asing pun harus menunjukkan komitmen untuk kepentingan nasional dan turut menjaga keutuhan NKRI. Regulasi ini dinilai penting, karena diduga kuat banyak LSM yang bekerja tidak untuk kepentingan nasional, melainkan untuk *funding agency* asing.

Jika dicermati secara mendalam dari RUU ormas, paling tidak ada tiga poin yang penting diperhatikan. *Pertama*, RUU Ormas berpotensi menggeneralisasi semua lembaga sosial kemasyarakatan. Itu berarti posisi ormas yang telah berkontribusi luar biasa bagi perjuangan kemerdekaan dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, seperti Muhammadiyah dan NU, tak berbeda dengan LSM baru.

Berkaitan dengan persoalan ini, RUU ormas harus membedakan secara tegas peraturan untuk ormas dan LSM, apalagi ormas asing. Poin ini penting diperhatikan karena Muhammadiyah dan NU

dengan ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial lainnya memiliki jaringan yang luas mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Itu berbeda dengan LSM yang hanya menekankan pekerjaan di satu bidang dan bersifat elitis. Karena itu, penyamaan ormas dan LSM jelas sebuah kesalahan yang mendasar.

Kedua, RUU ormas membuka peluang munculnya otoritarianisme baru. Apalagi, dalam RUU itu ada ketentuan bahwa Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) dapat mencabut izin ormas. Jika itu yang terjadi, akan muncul budaya represif atas nama undang-undang. Padahal, kebebasan berserikat dan berkumpul jelas diatur dalam konstitusi. Apalagi, konteks pembuatan UU No 8/1985 dan RUU Ormas jauh berbeda. UU No 8/1985 dibuat suasana rezim otoritarian Orde Baru. Sementara RUU Ormas kini disusun dalam suasana demokratis. Karena itu, RUU Ormas seharusnya menjamin Ormas untuk menampilkan kekhasan asal tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional NKRI.

Ketiga, RUU ormas mewajibkan pencantuman Pancasila sebagai asas bagi setiap Ormas. Eloknya, RUU Ormas memberikan kelonggaran bagi Ormas yang ingin menggunakan asas lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila. Jika itu yang dilakukan, Ormas berbasis agama tidak harus mengganti asasnya dengan Pancasila. Jangan korek lagi trauma sosial dan politik asas tunggal era Orde Baru yang justru menyempitkan keterbukaan ideologi Pancasila. Tak perlu ada tafsir tunggal atas Pancasila dengan menafikan indahnyanya pelangi keragaman yang membentuk Indonesia tercinta.

Jika beberapa hal yang berpotensi memicu pertentangan itu kembali didialogkan, rasanya masing-masing pihak, yakni pemerintah, legislatif, dan ormas yang menjadi sasaran RUU, pasti menemukan jalan keluar.

Memperkuat Pilar *Civil Society*

Konsep *civil society* umumnya dipahami sebagai kehidupan sosial yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang disepakati warga. Itu berarti nilai-nilai *civil society* sesungguhnya sangat penting untuk mewujudkan sikap dan tindakan yang bebas dari kepentingan negara atau partai politik.

Pendek kata, *civil society* menekankan pentingnya ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai media komunikasi antarwarga. Mengingat begitu pentingnya keberadaan *civil society* dalam kehidupan berbangsa maka sejak pertengahan 1990-an konsep ini menjadi salah satu tema yang paling banyak dibicarakan umat. Konsep *civil society* pun dicarikan padanan istilah agar lebih membumi, bernuansa Islami, dan selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Beberapa pemikir kemudian menyandingkan *civil society* dengan konsep masyarakat madani (Dato Seri Anwar Ibrahim), masyarakat

sipil (Mansour Fakih), serta masyarakat kewargaan (Ryas Rasyid dan Riswanda Immawan). Meski berbeda-beda, beberapa istilah tersebut secara substantif bermuara pada perlunya penguatan peranan masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Kehadiran *civil society* sangat bermanfaat untuk mengontrol kebijakan negara atau partai politik yang cenderung memosisikan rakyat sebagai subyek yang lemah.

Sebagai kekuatan pengontrol kebijakan pemerintah dan partai politik, *civil society* dituntut untuk mandiri. Tetapi sangat disayangkan, pilar-pilar *civil society* belum sepenuhnya mandiri tatkala berhadapan dengan kepentingan negara dan partai. Elemen *civil society* masih menunjukkan ketergantungan pada negara, terutama bantuan pendanaan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin *civil society* dapat berdiri tegak sekaligus kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan kegiatan selalu meminta belas kasihan?

Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka pasti muncul sikap “ewuh pakewuh” tatkala harus mengkritisi berbagai kebijakan yang kurang mencerminkan rasa keadilan. Padahal kemandirian mutlak diperlukan untuk menjamin independensi pandangan, sikap, dan tindakan. Konteks sosial politik terkini, jelas sekali membutuhkan kiprah *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang dan pengontrol.

Eksistensi *civil society* diharapkan dapat memainkan peran strategis di tengah kegaduhan situasi politik Tanah Air. Apalagi kini partai pendukung pemerintahan baru yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang berhadap-hadapan dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Partai-partai yang tergabung dalam KIH merupakan pendukung pasangan pemenang pilpres, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sementara partai-partai yang tergabung dalam KMP adalah pendukung pasangan yang kalah dalam pilpres, Prabowo-Hatta.

Persaingan KIH versus KMP tentu sangat berpengaruh pada hubungan kerja pemerintahan yang baru dengan parlemen. Apalagi KMP kini berkuasa penuh di parlemen karena sukses menguasai paket pimpinan DPR dan MPR. Dinamika politik di parlemen ini jelas membuat rakyat dan dunia usaha sangat khawatir. Dapat dibayangkan panasnya hubungan presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK, dengan KMP yang menguasai DPR dan MPR.

Dalam suasana politik yang diwarnai persaingan itulah kiprah *civil society* mutlak diperlukan. Jika hubungan antarlembaga negara

terus memanas, yang menjadi korban adalah rakyat. Itu karena rakyat pasti tidak dapat merasakan perubahan ke arah yang lebih baik sebagai konsekuensi pergantian kepemimpinan nasional. Untuk itulah pilar-pilar *civil society* harus menampilkan diri sebagai penengah sekaligus penyambung kepentingan rakyat.

Kita berharap ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tampil sebagai kekuatan *civil society* yang sebenarnya. Dua ormas terbesar yang jejak kejuangannya telah teruji ini pasti dapat menekan anggota legislatif agar bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat. Bersama dengan kekuatan *civil society* lain, Muhammadiyah dan NU juga dapat menjalankan fungsi *check and balances* pada pemerintahan yang baru. Semua ini harus dilakukan pilar-pilar *civil society* agar pohon demokrasi yang tumbuh subur tidak layu.

Selain mengandalkan kekuatan ormas, kita juga berharap pada media massa. Kekuatan media cetak dan elektronik sejauh ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi kontrol. Di luar ormas dan media massa kita juga dapat mengandalkan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Demikian juga dengan asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok *civic forum* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua kelompok ini dapat bersinergi demi tegaknya *civil society* yang kuat.

Jika menengok kasus-kasus masa lalu yang menjadi perhatian publik, pilar-pilar *civil society* di negeri ini layak berbangga. Itu karena kekuatan *civil society* pernah menunjukkan kiprah luar biasa dalam kasus yang menimpa mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dalam kasus yang populer disebut “Cicak versus Buaya”, kekuatan *civil society* sukses memberikan tekanan pada kejaksaan dan kepolisian. Demikian juga kasus “Gerakan Koin untuk Prita” dalam rangka membantu Prita Mulyasari untuk lepas dari jeratan hukum.

Dua kejadian itu membuktikan betapa kesadaran masyarakat sudah demikian tinggi. Yang patut dibanggakan, ternyata dukungan berbagai kelompok *civil society* bersifat lintas agama, budaya, etnis, dan generasi. Kini dunia politik nasional sedang dilanda prahara hebat seiring dengan penetapan paket perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Misalnya, penetaan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang populer

disebut UU MD3. Yang tidak kalah heboh adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan DPR, dari pilihan rakyat secara langsung menjadi pilihan DPRD setempat.

Dua peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses politik di DPR harus menjadi perhatian *civil society*. Dalam konteks inilah *civil society* dapat menjadi kekuatan untuk memberikan daya dobrak (*the striking force*) pada parlemen agar melahirkan kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyat. Bukankah anggota dewan yang terhormat merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung?